

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IV/MPR/1978
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian Program-program Pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus, untuk dapat mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;
 - b. bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia;
 - c. bahwa pokok-pokok penyusunan dan penguangannya haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan secara sistematis, dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh;
 - d. bahwa oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977, perlu menetapkan Ketetapan yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional

berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

- Mengingat :**
1. Pasal 1 Ayat (2) dan pasal 3 Undang Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR-RI No: IV/MPR/1973;
 3. Ketetapan MPR-RI No: VIII/MPR/1973;
 4. Keputusan-keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1977, No: 3/MPR/1977, No: 4/MPR/1977, No: 1/MPR/1978 dan No: 2/MPR/1978;
 5. Ketetapan MPR-RI No: I/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No: 2/MPR/1977.

- Memperhatikan:**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan memperhatikan Ketetapan MPR-RI No: V/MPR/1973;
 2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Maret 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Garis-garis Besar Haluan Negara disusun sebagai berikut :

- (a) Bab I Pendahuluan;
- (b) Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional;
- (c) Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang;
- (d) Bab IV Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Ketiga;
- (e) Bab V Penutup .

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1, terdapat dalam Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi Bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3

Dengan adanya Ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ini, dapat diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 4

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan Bagian Ketetapan yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya.

Pasal 5

Ketetapan ini disahkan pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 4 Ketetapan ini.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 22 Maret 1978.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

ADAM MALIK

Wakil Ketua

t.t.d

MASHURI, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d

K.H. MASJKUR

Wakil Ketua

t.t.d.

R. KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d.

H. ACHMAD LAMO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI

NASKAH GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

B A B I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah suatu Haluan Negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Pola Umum Pembangunan Nasional tersebut merupakan rangkaian program-program Pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.
3. Rangkaian program-program Pembangunan yang terus menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TUJUAN NASIONAL seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia, yang pada tingkat sekarang ini sedang melakukan Pembangunan Nasional dengan tujuan, agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam UUD 1945.

C. LANDASAN

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun berdasarkan landasan idiiil Pancasila dan konstitusional Undang Undang Dasar 1945.

D. POKOK-POKOK PENYUSUNAN

DAN PENUANGAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang, maka Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan Nasional secara sistematis sebagai berikut :

1. POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL;
2. POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG;
3. POLA UMUM PELITA III.

E. PELAKSANAAN

1. Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dilaksanakan oleh Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dan atau dalam garis-garis kebijaksanaan Pemerintah.
2. Tiap lima tahun sekali Garis-garis Besar Haluan Negara ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan Rakyat dan Bangsa Indonesia.

www.tatanusa.com

B A B II

POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

B. LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

C. ASAS-ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Asas Manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat dan bagi pengembangan pribadi Warga Negara.
2. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi Bangsa harus merupakan usaha bersama dari Bangsa dan seluruh Rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
3. Asas Demokrasi, ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang Politik, Sosial dan Ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
4. Asas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil-hasil material dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh Bangsa dan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma-baktinya yang diberikannya kepada Bangsa dan Negara.
5. Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan, ialah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan material dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan

perikehidupan darat, laut dan udara, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

6. Asas Kesadaran Hukum, ialah bahwa tiap Warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

D. MODAL DASAR DAN FAKTOR-FAKTOR DOMINAN

1. Modal Dasar

Modal Dasar Pembangunan Nasional yang dimiliki oleh Rakyat dan bangsa Indonesia ialah :

- a. Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia.
- b. Kedudukan geografi Indonesia sepanjang garis khatulistiwa dan posisinya sebagai wilayah penghubung, serta terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera raya, dengan iklim tropika dan cuaca musim-musimnya memberikan kondisi alamiah serta kedudukan dan peranan strategis yang sangat tinggi nilainya.
- c. Sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di darat dan di laut memberikan kehidupan Bangsa di segala bidang.
- d. Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.
- e. Modal Rohaniah dan Mental, yaitu Kepercayaan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi Bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan Bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat membawa Bangsa menuju cita-citanya.
- f. Modal Budaya, yakni budaya Bangsa Indonesia yang telah berkembang sepanjang sejarah Bangsa.
- g. Potensi Efektif Bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dicapai oleh Bangsa sepanjang sejarahnya, termasuk kekuatan sosial politik antara lain Partai Politik dan Golkar.
- h. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari Rakyat dan bersama Rakyat menegakkan kemerdekaan Bangsa dan Negara.

2. Faktor-faktor Dominan

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar pembangunan untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional dengan landasan-landasan serta asas-asas di atas, perlu diperhatikan faktor-faktor dominan sebagai berikut :

- a. Faktor demografi, dan sosial budaya;
- b. Faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi;
- c. Faktor klimatologi;
- d. Faktor flora dan fauna;
- e. Faktor kemungkinan pengembangan.

E. WAWASAN NUSANTARA

Wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, dalam arti :
 - a. Bahwa Kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu Kesatuan Wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh Bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama Bangsa.
 - b. Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu Kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya Falsafah serta Ideologi Bangsa dan Negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan Bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdikan kepada Kepentingan Nasional.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti :
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan

- masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan Bangsa.
- b. Bahwa Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan Budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh Bangsa.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti:
 - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah Tanah Air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupannya.
 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti :
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa.

F. KETAHANAN NASIONAL

1. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan Bangsa dan Negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu Bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan Bangsa dan Negara.
2. Untuk tetap memungkinkan berjalannya Pembangunan Nasional yang selalu harus menuju tujuan yang ingin kita capai dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam, perlu dipupuk terus menerus Ketahanan Nasional yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan Negara.
3. Berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi Pembangunan Nasional.

B A B III

POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Berdasarkan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional, disusunlah Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun sebagai usaha pengarahan dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan Bangsa pada umumnya dalam menuju tercapainya cita-cita Nasional.

A. PENDAHULUAN

1. Kemerdekaan yang dicapai berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui perjuangan Rakyat, telah memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, yakni suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, Bangsa Indonesia mengalami gelombang pertentangan-pertentangan politik yang tajam dan rentetan pergolakan yang terus-menerus, sedangkan usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi tidak ditangani dengan sungguh-sungguh sehingga keadaan ekonomi mengalami kemerosotan yang menambah dan sangat memberatkan penderitaan Rakyat banyak.
3. Setelah Pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965 dapat digagalkan, berkat lindungan dan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kesadaran dan keteguhan Rakyat pada landasan Falsafah Pancasila, maka Orde Baru dengan perjuangan yang sungguh-sungguh telah berhasil menciptakan stabilitas Nasional, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik, untuk selanjutnya melakukan serangkaian Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, menyeluruh, terarah dan terpadu, bertahap dan berencana, sebagai satu-satunya jalan untuk mengisi kemerdekaan serta mencapai tujuan Nasional.

Semua usaha dan perjuangan itu akan terwujud apabila seluruh Bangsa setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

4. Agar pelaksanaan Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan Nasional, perlu ditentukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun yang pertama dan kedua yang selanjutnya disusul dengan Pelita ketiga, Pelita keempat dan seterusnya, sehingga merupakan rangkaian Pelita yang saling sambung-menyambung dalam suatu kesatuan yang serasi.

B. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia.

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya; bahwa pembangunan itu merata di seluruh Tanah Air; bahwa bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh Rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir Pembangunan Nasional; secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Pembangunan Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap. Adapun tujuan setiap tahap pembangunan adalah : untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.
3. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok Rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi maka pembangunan bidang politik diarahkan pada peningkatan kesadaran bernegara bagi seluruh Rakyat sesuai dengan UUD 1945.

Pembangunan di luar bidang ekonomi tersebut dilaksanakan seiring dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Sedangkan sebaliknya dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi, maka tersedianya sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan di bidang-bidang sosial budaya, politik dan Pertahanan Keamanan Nasional.

4. Pelaksanaan Pembangunan Nasional harus berjalan bersamaan dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, karena kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi akan menghambat pembangunan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa stabilitas nasional memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan nasional memperkuat stabilitas nasional.
5. Pelaksanaan Pembangunan di samping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh Rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka diwujudkan asas keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan wajar; bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Di lain pihak partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula di dalam menerima kembali hasil pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan Rakyat.
6. Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri antara lain dengan peningkatan kegiatan koperasi, agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia, sesuai dengan prinsip percaya kepada kemampuan sendiri. Untuk itu, koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya, sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan.

Kebijaksanaan ini harus diambil dalam rangka memecahkan ketidak selarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional sedang di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional.

7. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang di samping meningkatkan produksi nasional, maka pertumbuhan ekonomi harus mempercepat pula pertumbuhan lapangan kerja, karena pemberantasan pengangguran dengan jalan memperluas kesempatan kerja merupakan sasaran penting bagi Pembangunan Jangka Panjang, bukan saja karena kesempatan kerja memiliki nilai ekonomi, melainkan juga karena mengandung nilai kemanusiaan dengan menumbuhkan rasa harga diri, sehingga dengan demikian memberi isi kepada asas kemanusiaan.

Untuk mengisi lapangan kerja yang akan tersedia diperlukan tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan ketrampilan yang sesuai dengan keperluan pembangunan, sehingga perluasan lapangan kerja dan pembinaan sistim pendidikan yang sesuai dengan keperluan pembangunan, atau yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan, harus dilaksanakan secara bersama dan serasi.

8. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana, yang mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan keluarga berencana akan mengakibatkan hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan keluarga berencana ditempuh dengan cara-cara sukarela, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping itu diperlukan pula usaha penyebaran penduduk yang lebih wajar melalui transmigrasi sebagai sarana dalam meningkatkan kegiatan pembangunan secara merata di seluruh Tanah Air.

9. Pembangunan Jangka Panjang harus pula mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari sektor-sektor di luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar, dan industri menjadi tulang punggung ekonomi bagi penduduk yang hidup dari sektor-sektor di luar pertanian semakin bertambah dan komposisi ekspor akan berubah sehingga ekspor Indonesia

akan semakin banyak terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-barang jadi.

Dengan demikian akan berarti meningkatnya ketahanan ekonomi Indonesia terhadap perubahan-perubahan keadaan alam dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi dunia.

10. Dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang.
11. Pembangunan Nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap.

Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan Pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa. Pengerahan dari dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.

12. Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Maka selama Indonesia belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan Nasional.
13. Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan sarat-sarat; tetap memberikan kesempatan kerja yang banyak, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menggunakan alat-alat yang sebanyak mungkin dihasilkan sendiri dan mampu untuk dipelihara sendiri, mendukung tercapainya sasaran pembangunan dan mempertinggi keterampilan untuk menggunakan teknologi yang lebih maju di kemudian hari.
14. Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

a. Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:

- 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
- 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
- 4). Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga-lembaga perwakilan Rakyat pula.
- 5). Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 6). Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- 7). Potensi inisiatif dan daya kreasi setiap Warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- 8). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

b. Dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut :

- 1) Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- 2) Sistem etatisme dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.

- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
15. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai bidang dengan pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang adalah sebagai berikut:
- a. Bidang Ekonomi

Struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Dengan prinsip bahwa Repelita yang terdahulu mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan Rakyat banyak serta untuk menciptakan landasan bagi Repelita berikutnya, maka struktur ekonomi yang seimbang itu akan dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian Repelita-repelita ialah :

- Repelita Pertama : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
- Repelita Kedua : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
- Repelita Ketiga : meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
- Repelita Keempat : meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya.

Dengan meningkatkan bidang industri dan pertanian secara bertahap seperti tersebut di atas, akan terpuhnilah kebutuhan pokok rakyat dan akan tercapailah struktur ekonomi yang seimbang, ialah struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat, setelah dilampaui Pembangunan Lima Tahun yang Kelima atau yang Keenam akan menjadi landasan bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional, ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

b. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial-Budaya

Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong-royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan Bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.

Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari Manusia Budaya Indonesia sebagai pendukungnya.

c. Bidang Politik

Dalam bidang politik dalam negeri dimantapkan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran itu termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang semakin efektif serta terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan perannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.

d. Bidang Pertahanan Keamanan

Sesuai Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional, maka diciptakanlah sistem pertahanan rakyat semesta yang mampu mensukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya, pembangunan nasional pada khususnya, dari setiap ancaman yang datang dari luar negeri serta dari dalam negeri, sehingga usaha bangsa dalam mencapai tujuan nasional benar-benar aman dan tertib.

Dalam pelaksanaan doktrin tersebut di atas, ABRI yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat untuk menegakkan dan mengisi kemerdekaan, adalah inti dari sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di samping selaku kekuatan Hankam, juga merupakan kekuatan Sosial.

C. CATATAN DASAR

Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun yang penyusunannya berupa Repelita diserahkan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

B A B IV

POLA UMUM PELITA KETIGA

A. PENDAHULUAN

1. Dengan hasil-hasil positif yang dicapai dalam Pelita Kedua maka terciptalah keadaan yang mantap untuk mulai dengan Pelita Ketiga sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.
2. Dalam Pelita Ketiga, sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Pelita Kedua, akan diperluas kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembagian pendapatan yang makin merata dan perluasan kesempatan kerja. Demikian pula halnya dengan berbagai bidang atau masalah yang dalam Pelita Kedua belum dapat sepenuhnya dipecahkan seperti peningkatan laju pembangunan ekonomi di daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya.
3. Dalam pelaksanaan Pelita Ketiga dilanjutkan kebijaksanaan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan ialah : pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
4. Pelita Ketiga meliputi jangka waktu 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984.

B. TUJUAN

Sebagaimana halnya dengan setiap tahap pembangunan dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka tujuan Pelita Ketiga ialah :

- Pertama : Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.
- Kedua : Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

C. PRIORITAS

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka dalam Pelita Ketiga prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik

berat pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi dalam rangka menseimbangkan struktur ekonomi Indonesia.

2. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan dalam bidang politik, sosial, budaya dan lain-lain, akan ditingkatkan sepadan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan bidang ekonomi.

D. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

U M U M

1. Dalam Pelita Ketiga arah dan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh selama Pelita Kedua perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasakan peningkatan kesejahteraan yang makin merata bagi seluruh rakyat, dan dengan demikian makin memperkokoh Ketahanan Nasional.
2. Pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila stabilitas nasional tetap terpelihara, karena itu haruslah selalu diusahakan untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik stabilitas di bidang politik maupun di bidang ekonomi.
3. Untuk memantapkan stabilitas di bidang politik, haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta makin tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, yang merupakan sarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur Pemerintah pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya, perlu terus-menerus dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan serta kewibawaannya. Usaha-usaha untuk ini termasuk pula pembangunan di bidang politik, aparatur Pemerintah dan hukum akan mendorong makin berkembangnya kreativitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Keadaan keamanan dan ketertiban umum perlu tetap dipelihara dan ditingkatkan untuk menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kelancaran pelaksanaan Pelita Ketiga.

Untuk itu kesiagaan, kewaspadaan dan keterampilan ABRI perlu terus ditingkatkan, sedangkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban perlu terus dibina dan ditumbuhkan. Kegiatan-kegiatan dalam bidang ini termasuk dalam kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan.

5. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif harus diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia perlu diikuti secara saksama agar dapat diketahui pada waktunya, kemungkinan-kemungkinan yang dapat menggoncangkan stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan Pelita Ketiga, sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamatkannya.

Peranan Indonesia dalam memupuk kerjasama serta persahabatan antara negara-negara yang sedang membangun harus dipelihara dan lebih ditingkatkan untuk membantu mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru yang lebih adil.

Di wilayah Asia Tenggara kerjasama dan organisasi ASEAN perlu lebih diperkuat untuk mempertinggi ketahanan nasional masing-masing negara anggota serta dalam rangka mencapai ketahanan regional.

6. Untuk memantapkan stabilitas di bidang ekonomi, maka kebijaksanaan ekonomi yang selama ini berhasil baik perlu dilanjutkan, seperti anggaran belanja yang berimbang dan dinamis, tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari khususnya 9 bahan pokok yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, tersedianya cadangan devisa yang cukup memadai, keseimbangan moneter, dan lain-lain, yang kesemuanya itu harus disempurnakan dan dipadukan dengan usaha-usaha yang mendorong laju pembangunan pada umumnya. Untuk itu perlu ditempuh kebijaksanaan yang serasi di berbagai bidang seperti anggaran negara, perpajakan, moneter, perkreditan, perdagangan, harga, upah dan sebagainya.
7. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Pelita Ketiga, harus dapat dicapai kenaikan produksi dan jasa di berbagai sektor pembangunan ekonomi yang meliputi sektor-sektor pertanian, industri, pertambangan, prasarana, energi, dan lain-lain. Dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor tersebut yang harus selalu berorientasi pada perluasan kesempatan kerja diterapkan teknologi yang tepat guna, sedang di samping itu juga diadakan persiapan untuk pengembangan teknologi guna pelaksanaan pembangunan dalam tahapan yang akan datang.
8. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas perlu terus ditingkatkan melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, bukan saja dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan ekspor, terutama juga untuk meningkatkan pendapatan sebagian terbesar rakyat, dalam rangka peningkatan harkat dan martabat rakyat pedesaan, peningkatan arus

transmigrasi serta untuk menjadikan sektor pertanian semakin kuat guna mendukung perkembangan industri.

9. Pembangunan sektor industri besar, menengah, kecil dan tradisional perlu ditingkatkan dan diperluas di samping untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produksi dalam negeri, juga untuk makin menseimbangkan struktur ekonomi Indonesia, sehingga pada saatnya menjadi struktur ekonomi yang berdasarkan industri yang didukung oleh pertanian yang kuat.
10. Untuk pelaksanaan Pelita Ketiga diperlukan pembiayaan yang memadai, yang terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber-sumber luar negeri merupakan sumber pelengkap.

Dalam hubungan ini sistem perpajakan perlu disempurnakan agar kegiatan ekonomi semakin berkembang, kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri semakin meningkat dan pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah semakin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Di samping itu sistem perpajakan harus pula dapat membantu menciptakan terwujudnya pola hidup sederhana, yang sangat penting untuk memperkokoh solidaritas sosial. Segala pajak harus didasarkan atas peraturan perundangan. Untuk itu diperlukan aparat perpajakan yang mampu dan bersih. Begitu pula kebijaksanaan di dalam bidang pasar modal perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar dapat tercapai pemerataan pemilikan dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi, di samping merupakan sumber pembiayaan dalam negeri yang perlu terus dikembangkan.

11. Di samping pembiayaan dalam bentuk rupiah, diperlukan pembiayaan dalam bentuk devisa terutama untuk mengimpor barang modal dan barang-barang lain yang belum dapat atau belum cukup dihasilkan di dalam negeri. Untuk itu langkah-langkah untuk mendorong ekspor dan meningkatkan pariwisata dari luar negeri ke Indonesia perlu terus diusahakan.
12. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan, maka pinjaman dari luar negeri hanya dapat diterima sepanjang pinjaman-pinjaman tersebut tidak dikaitkan dengan ikatan-ikatan politik, sedangkan syarat-syarat pinjaman tidak akan memberatkan dan dalam batas-batas kemampuan untuk pembayaran kembali, sedang penggunaan pinjaman tersebut haruslah untuk proyek-proyek produktif yang bermanfaat.
13. Penanaman modal asing dilakukan di sektor-sektor yang produksinya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri atau di sektor-sektor yang memperluas ekspor dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan berkembangnya

perusahaan-perusahaan nasional. Penanaman modal asing disertai dengan syarat-syarat untuk membuka kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknologi kepada bangsa Indonesia dalam waktu yang secepatnya memelihara keseimbangan kualitas tata lingkungan dan diarahkan agar mendukung tujuan pembangunan serta memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional.

14. Dalam Pelita Ketiga langkah-langkah untuk meningkatkan produksi harus merupakan usaha yang terpadu dengan langkah-langkah untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja. Demikian pula pertumbuhan produksi harus mendorong swadaya, prakarsa dan partisipasi swasta serta seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
15. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang tetap mendesak dalam Pelita Ketiga. Oleh karenanya diperlukan berbagai kebijaksanaan yang menyeluruh seperti pendidikan keterampilan, pendidikan yang dapat menciptakan kegiatan kerja, pembangunan industri, pembangunan prasarana, penentuan skala prioritas investasi, kebijaksanaan perpajakan serta perkreditan, pemilihan teknologi yang tepat guna dan sebagainya. Di samping itu usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja juga perlu dituangkan dalam program-program khusus, antara lain dengan melanjutkan dan memperluas program bantuan pembangunan dan proyek padat karya di daerah pedesaan.
16. Penggunaan teknologi yang padat karya, mudah dipelihara dan sejauh mungkin menggunakan bahan-bahan dalam negeri penting peranannya di dalam mewujudkan sasaran-sasaran peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu dalam Pelita ketiga diusahakan untuk mengembangkan serta memanfaatkan teknologi yang tepat, yang memenuhi pertimbangan-pertimbangan tersebut. Pengembangan dan penggunaan teknologi padat, modal diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak tersedia teknologi padat karya atau untuk daerah-daerah yang sangat kekurangan tenaga kerja.
17. Dalam rangka makin pemeratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan yang sehat, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan menanggulangi masalah-masalah yang mendesak. Untuk itu berbagai program pembangunan sektoral perlu lebih diserasikan dengan potensi dan permasalahan masing-masing daerah, sedang program-program Inpres perlu disempurnakan, dilanjutkan dan diperluas. Dalam hubungan ini daerah-daerah minus dan daerah-daerah

yang padat penduduknya perlu mendapat perhatian khusus, antara lain dalam rangka mengurangi derasnya perpindahan penduduk ke kota-kota besar.

18. Usaha pembangunan daerah dan perluasan kesempatan kerja perlu didorong melalui usaha penyebaran dan pembinaan pemukiman yang serasi dengan sumber alam dan lingkungan hidupnya menuju peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk ini perlu diperluas dan ditingkatkan pelaksanaan transmigrasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun transmigrasi spontan, dan pemukiman kembali penduduk yang masih hidup secara berpindah-pindah dan terpencar-pencar.

19. Salah satu segi yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penggunaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini diperlukan sekali peningkatan inventarisasi dan evaluasi sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Demikian pula perlu ditingkatkan rehabilitasi sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan serta langkah-langkah untuk mencegah kerusakan terhadap sumber-sumber alam dan lingkungan hidup, sehingga dapat dijamin kelestariannya.
20. Agar pemanfaatan tanah sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, maka di samping menjaga kelestariannya perlu dilaksanakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.
21. Erat hubungannya dengan masalah kependudukan adalah pelaksanaan program Keluarga Berencana yang dalam Pelita Kedua telah menunjukkan hasil-hasilnya. Program tersebut perlu diperluas dan diintensifkan agar dalam jangka panjang benar-benar dapat menjamin terkendalikannya pertumbuhan penduduk Indonesia dan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera.
22. Untuk makin pemeratakan hasil-hasil pembangunan dalam Pelita Ketiga, maka perlu ditingkatkan program-program untuk meningkatkan penghasilan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang masih rendah, seperti nelayan, pekerja kerajinan rakyat, petani penggarap yang tidak memiliki tanah, petani pemilik tanah yang sangat kecil, buruh tani dan sebagainya.

Demikian pula perlu dilanjutkan program-program yang memberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan memperkuat permodalan, meningkatkan keahlian dan kemampuan, serta memperluas pemasaran.

23. Dalam rangka pengembangan ekonomi nasional yang sehat melalui suatu sistem yang sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan Bangsa serta ketahanan nasional yang mantap perlu dilanjutkan dan ditingkatkan langkah-langkah yang telah diambil dalam Pelita Kedua untuk mengembangkan pengusaha Nasional Indonesia, sehingga dapat mempercepat proses untuk memberikan peranan yang wajar sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
24. Kebijakan penyediaan dana perkreditan yang telah dilaksanakan dalam Pelita Kedua perlu dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas, terutama kredit bimas, kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, kredit candak kulak dan berbagai macam kredit lainnya yang mendorong pemerataan kegiatan pembangunan serta pemerataan penghasilan.
25. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dipelbagai sektor maka koperasi diberi peranan dan ruang gerak yang luas. Dalam hubungan ini diutamakan untuk lebih memantapkan kemampuan BUUD/KUD dan koperasi-koperasi primer lainnya sehingga peranan koperasi dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan semakin besar.
26. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Karena itu pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemampuan negara dan masyarakat untuk memperluas tersedianya sarana sosial-budaya, antara lain di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesehatan, sosial, agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebudayaan, olah raga, perumahan, pembinaan generasi muda, pengembangan lingkungan hidup serta sumber alam dan sebagainya. Ini berarti makin meningkatnya pembangunan di bidang-bidang sosial-budaya dan memperbesar kemampuan serta kesempatan rakyat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.
27. Dengan makin meningkat dan meluasnya pembangunan di bidang ekonomi dan sosial-budaya dalam Pelita Ketiga maka makin meningkat dan merata pula kesejahteraan rakyat dan diharapkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi semakin kecil. Hal ini akan makin memperbesar kesadaran rakyat akan arti dan manfaat pembangunan, sehingga memperkuat tekad rakyat untuk melanjutkan pembangunan tahap-tahap berikutnya.

EKONOMI

1. Pertanian

- a. Pembangunan pertanian dilanjutkan dalam rangka meningkatkan produksi pangan, meningkatkan ekspor, meningkatkan penghasilan petani dan memungkinkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri.
- b. Peningkatan produksi pangan seperti beras dan palawija, produksi pangan yang berasal dari hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan menuju swasembada sekaligus memperbaiki mutu makanan khususnya dengan memperbesar penyediaan protein baik nabati maupun hewani. Peningkatan produksi pangan juga diarahkan untuk memperbaiki tingkat hidup petani, memperluas kesempatan kerja dan menjamin penyediaan pangan untuk masyarakat pada tingkat harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen.
- c. Peningkatan produksi perkebunan, kehutanan dan perikanan, di samping untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan penghasilan rakyat, juga bertujuan untuk menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor.
- d. Di samping memanfaatkan hasil hutan untuk pembangunan, perhatian penuh perlu diberikan pada pembinaan hutan sebagai sumber alam. Dalam rangka itu perlu sekali dilakukan usaha-usaha peningkatan penertiban penebangan hutan, penanaman kembali hutan-hutan yang rusak serta konversi sebagian hutan alam menjadi hutan buatan yang menghasilkan kayu industri. Di samping itu hutan perlu dikelola sedemikian rupa sehingga rakyat merasakan manfaatnya secara langsung. Hal ini akan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk membina kelestarian hutan.
- e. Dalam pembangunan pertanian perlu sekali diperhatikan rehabilitasi tanah kritis yang ditujukan untuk mempertahankan sumber air dan sumber alam lainnya. Rehabilitasi tanah kritis harus disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber alam sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam pelaksanaannya. Di dalam usaha rehabilitasi tanah-tanah kritis antara lain melalui reboisasi dan penghijauan, perlu ditekankan bukan saja penanamannya tetapi juga pemeliharaan dan pencegahan timbulnya tanah-tanah kritis baru.

- f. Pembangunan pertanian harus merupakan usaha yang terpadu dengan pembangunan daerah dan pedesaan. Dalam hubungan ini diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan secara efektif masalah penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata.
- g. Untuk menunjang pembangunan pertanian perlu diteruskan dan disempurnakan usaha penyuluhan dan pendidikan pertanian; juga perlu dilanjutkan perbaikan dan perluasan prasarana, penyediaan berbagai sarana produksi, serta penelitian dan pemilihan teknologi pertanian yang tepat, yang disebarakan ke seluruh daerah dan masyarakat petani.

2. **Industri**

- a. Pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi yang terlalu berat sebelah kepada produksi bahan mentah dan hasil-hasil pertanian ke arah struktur ekonomi yang lebih seimbang dan serasi.
- b. Pembangunan industri yang telah dilaksanakan dalam Pelita Kedua akan ditingkatkan lagi dengan lebih mengutamakan pembangunan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi.

Dengan demikian maka sebagian besar kebutuhan dalam negeri akan dapat dipenuhi sendiri sedangkan landasan ekspor Indonesia juga bertambah kuat, karena bergeser dari ekspor bahan mentah ke arah ekspor hasil produksi industri dalam negeri.

- c. Pembangunan industri juga diarahkan kepada pengembangan industri kecil dan sedang yang sifatnya padat karya demi terciptanya kesempatan kerja serta terciptanya suatu landasan pembangunan sektor industri yang lebih luas bagi pertumbuhan selanjutnya.

Di samping itu perlu diusahakan agar perkembangan industri besar dan menengah hendaknya dapat merangsang pertumbuhan industri kecil dan saling mengisi.

- d. Dalam melaksanakan pembangunan industri perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan usaha swasta nasional. Untuk itu Pemerintah perlu lebih memberikan perhatian pada pembangunan prasarana dan penciptaan iklim yang menunjang pertumbuhan industri. Dalam hubungan ini perlu diusahakan pengembangan pendidikan keterampilan guna peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan kecakapan manajemen para pengusaha nasional, terutama pengusaha kecil.

- e. Langkah lain untuk meningkatkan pengembangan industri adalah pembangunan wilayah industri di daerah-daerah tertentu. Di samping itu, dengan tetap memperhatikan asas efisiensi ekonomi, penyebaran industri ke daerah-daerah harus semakin lebih didorong.
- f. Dalam seluruh usaha peningkatan pembangunan industri ini harus diambil langkah-langkah agar pertumbuhan industri tidak membawa akibat rusaknya lingkungan hidup dan pemborosan penggunaan sumber alam.
- g. Dalam usaha membina industri yang sehat perlu sekali diberi perhatian pada industri yang hasil produksinya diperlukan oleh rakyat banyak dan sesuai dengan pola hidup sederhana. Pembangunan industri harus menghindarkan rangsangan bagi tumbuhnya pola konsumsi mewah.
- h. Perlu dikembangkan industri yang menunjang sektor pertanian, seperti industri alat-alat pertanian, pupuk, insektisida, pengolahan hasil pertanian dan lain-lain dalam rangka memperkuat dan memantapkan sektor pertanian, sehingga dapat tumbuh menjadi penunjang perkembangan sektor industri.

3. Pertambangan

- a. Melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam Pelita Kedua berupa inventarisasi dan pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam berupa sumber mineral dan energi sehingga penerimaan negara dari produksi ekspor pertambangan akan bertambah.
- b. Melanjutkan pengembangan teknologi penambangan, termasuk penelitian deposit bahan-bahan galian dan pengolahan berbagai macam bahan galian.
- c. Pengelolaan bidang pertambangan perlu diserasikan dengan kebijaksanaan umum di bidang energi dan bahan bakar serta dengan pengembangan wilayah, disertai dengan peningkatan pengawasan yang menyeluruh.
- d. Perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi swasta nasional pertambangan rakyat diberbagai usaha pertambangan.

4. Energi

- a. Pengembangan dan pemanfaatan energi perlu didasarkan kepada kebijaksanaan energi yang menyeluruh serta terpadu dengan memperhitungkan peningkatan kebutuhan, baik untuk ekspor maupun

untuk pemakaian dalam negeri serta kemampuan penyediaan energi secara strategis dalam jangka panjang.

- b. Dewasa ini minyak bumi merupakan sumber utama pemakaian energi di dalam negeri. Penggunaannya terus meningkat, sedang jumlah persediaan terbatas. Berhubung dengan itu perlu diambil langkah-langkah penghematan penggunaan minyak bumi di satu pihak dan di lain pihak pengembangan sumber-sumber energi lainnya, seperti batubara, tenaga air, tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga nuklir, tenaga matahari dan sebagainya.
- c. Sumber energi di pedesaan perlu lebih dikembangkan untuk memungkinkan penyediaan energi yang murah bagi masyarakat pedesaan sehingga kerusakan hutan, tanah dan air dapat dikurangi.
- d. Kebijakan dalam bidang-bidang lain yang menunjang kebijakan energi perlu diarahkan agar dengan kemampuan yang ada dapat dicapai hasil yang sebesar-besarnya, antara lain dengan meningkatkan pembinaan tenaga ahli, penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan teknologi.

5. Prasarana

- a. Pembangunan prasarana akan lebih ditingkatkan untuk dapat menunjang peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- b. Pembangunan pengairan termasuk rehabilitasi pengairan yang ditujukan untuk peningkatan produksi pangan harus diikuti dengan usaha-usaha pemeliharaan dan pemanfaatannya. Dalam hubungan ini harus ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan pengairan. Khususnya di luar Jawa pembangunan pengairan baru harus dilaksanakan sesuai dengan usaha perluasan areal pertanian baru.
- c. Pembangunan kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kota serta mendorong dan merangsang kegiatan ekonomi.
- d. Pembangunan prasarana angkutan dan perhubungan bertujuan untuk memperlancar arus barang/jasa dan manusia ke seluruh daerah, terutama daerah pedesaan dan daerah terpencil, dalam kota, sehingga dengan demikian merangsang dan menunjang pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Di samping itu pengangkutan dan perhubungan juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina persatuan bangsa dan negara.

- e. Pembangunan jalan mengutamakan peningkatan kondisi jalan yang sudah ada. Pembangunan jalan baru dilakukan apabila dapat meningkatkan serta pemeratakan pembangunan daerah/wilayah, terutama jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasarannya.

Karena itu perlu diusahakan pembangunan yang serasi antara jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Di samping itu diperlukan pula keserasian antara pembangunan jalan, pembangunan kereta api dan pembangunan bidang-bidang perhubungan lainnya.

- f. Peningkatan angkutan kereta api ditujukan untuk makin meningkatkan mutu pelayanannya serta menyehatkan pengusahaannya, agar berfungsi sebagai angkutan umum yang murah dan aman.
- g. Perhubungan sungai dan laut perlu ditingkatkan agar tersedia pelayanan angkutan yang lebih luas, teratur, lancar dan murah, terutama untuk daerah-daerah terpencil.
- h. Perhubungan udara perlu ditingkatkan agar tersedia pelayanan angkutan yang lebih teratur dan lancar, termasuk daerah-daerah terpencil.
- i. Pembangunan pos dan telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya.
- j. Pembangunan prasarana meteorologi ditujukan untuk menunjang keselamatan pelayanan dan penerbangan serta untuk kepentingan pertanian.
- k. Dalam pembangunan prasarana perlu selalu diperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat.

6. Pariwisata

- a. Kepariwisataan perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional.
- b. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain di bidang promosi, penyediaan fasilitas, serta mutu dan kelancaran pelayanan.
- c. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dalam negeri lebih ditujukan kepada pengenalan budaya bangsa dan tanah air.

7. Perdagangan

- a. Dengan makin meningkatnya produksi barang dan jasa maka efisiensi dan efektivitas penyaluran sarana-sarana produksi serta pemasaran hasil-hasil produksi perlu ditingkatkan. Sejalan dengan peningkatan hasil-hasil produksi tersebut perlu ditingkatkan pembinaan perdagangan dan tata niaga dalam negeri maupun luar negeri. Dengan makin sempurnanya sistem perdagangan maka akan makin meningkat pula pendapatan para produsen, makin lancar arus barang dan jasa yang menguntungkan konsumen dan dapat meningkatkan ekspor, sehingga makin besar pula penerimaan devisa negara.
- b. Di dalam kegiatan perdagangan, perlu lebih ditingkatkan peranan pedagang nasional, khususnya pedagang kecil golongan ekonomi lemah.
- c. Kegiatan perdagangan perlu lebih diarahkan untuk mendukung kegiatan produksi, terutama produksi yang dihasilkan oleh pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.

8. Koperasi

- a. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam usaha untuk meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi, perlu disempurnakan dan dilaksanakan konsep-konsep operasional yang menitikberatkan pada pembinaan prakarsa dan swakarya, meningkatkan keterampilan manajemen, pemupukan modal dari anggota koperasi agar koperasi sungguh-sungguh menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
- b. Koperasi harus digunakan pula sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.
- c. Dalam melaksanakan pembinaan koperasi yang diutamakan pada koperasi primer perlu diperhatikan usaha-usaha pembinaan secara horizontal dan vertikal pada tingkat nasional dan daerah. Sepadan dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, maka peranan dan kemampuan BUUD/KUD dan koperasi lainnya harus disempurnakan dan ditingkatkan, sehingga tumbuh menjadi koperasi primer desa yang tangguh dan mampu menjadi kekuatan ekonomi desa, serta mengantarkan masyarakat desa menuju kemajuan dan kesejahteraan.

9. Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah

- a. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan, maka perluasan dunia usaha swasta nasional haruslah

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan kerjasama yang serasi antara Pemerintah, perusahaan milik negara, dunia usaha swasta dan koperasi. Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha antara lain dengan jalan mengusahakan ketenteraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perizinan dan sebagainya.

- b. Pembinaan usaha golongan ekonomi lemah dilaksanakan antara lain dengan jalan pemberian bantuan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan, bantuan keahlian, penyuluhan, dan melalui usaha-usaha dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kewiraswastaan.
- c. Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapat perlindungan.
- d. Kewiraswastaan, keahlian dan kemampuan usaha dari pengusaha nasional perlu ditingkatkan sehingga pengalihan pengelolaan usaha-usaha swasta asing ke tangan swasta nasional dapat dipercepat.

10. Tenaga kerja

- a. Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan.
- b. Kebijakan tenaga kerja harus pula diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik melalui perbaikan informasi serta pembinaan dan peningkatan keterampilan.

Demikian pula kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial di dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh.

- c. Pembinaan hubungan perburuhan perlu diarahkan kepada terciptanya keserasian antara buruh dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dimana masing-masing pihak saling menghormati dan saling mengerti terhadap peranan serta hak dan kewajibannya masing-masing dalam keseluruhan proses produksi, serta peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan. Serikat Buruh

memperjuangkan kepentingan sosial ekonomi dan hak-hak kaum buruh, sedang Pemerintah melindungi kepentingan buruh dan kehidupan Serikat Buruh.

Oleh karena itu kerjasama yang serasi antara buruh, pengusaha dan Pemerintah perlu ditingkatkan.

11. Transmigrasi

- a. Program transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi dan pertanian baru dalam rangka pembangunan daerah, khususnya di luar Jawa, yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup para transmigran dan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Dalam pelaksanaan transmigrasi perlu diperhatikan pula kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
- b. Di samping transmigrasi yang langsung digerakkan oleh Pemerintah maka transmigrasi spontan juga perlu lebih didorong dengan memperluas pembangunan dan kegiatan ekonomi di luar Jawa serta dengan meningkatkan hubungan antarpulau.
- c. Karena penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektoral maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi, perlu dilakukan persiapan-persiapan yang matang, antara lain penyediaan tanah garapan, mengenai penyelesaian masalah pemilikan tanah di daerah transmigrasi dan armada pengangkutan yang mencukupi.

12. Pembangunan Daerah

- a. Dalam Pelita ketiga ditingkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah, sedangkan keseluruhan pembangunan daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan demi terbinanya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan di dalam mewujudkan tujuan nasional.
- b. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih merata seluruh daerah diusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah, antara lain dengan peningkatan perhubungan antar daerah dan antar pulau, memberikan bantuan dan rangsangan bagi peningkatan pembangunan daerah-daerah yang relatif terbelakang, serta penyebaran penduduk yang lebih merata melalui transmigrasi.

- c. Untuk melaksanakan peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah. Disamping itu dengan memperhatikan kemampuan daerah, perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru serta peningkatan dan penyempurnaan penyaluran berbagai dana bantuan pembangunan. Dalam rangka ini kemampuan serta perbaikan aparatur Pemerintah Daerah perlu terus ditingkatkan baik aparatur otonom maupun aparatur vertikal dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab.
- d. Di dalam melaksanakan pembangunan, masing-masing Daerah perlu lebih meningkatkan kemampuan penduduknya untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian berbagai sumber kekayaan alam, mengatasi berbagai masalah yang mendesak dan membina lingkungan pemukiman yang sehat.
- e. Koordinasi fungsional perwilayahan dan kerjasama pembangunan antar daerah perlu lebih ditingkatkan untuk lebih melancarkan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan.
- f. Perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan seperti INPRES bantuan desa dan lain-lain.
- g. Pembangunan kota perlu lebih memperhatikan keserasian hubungan antara kota dengan lingkungan dan antara kota dengan daerah pedesaan sekitarnya serta keserasian pertumbuhan kota itu sendiri.

13. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber alam perlu lebih ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih mengenal sumber alam, hutan, tanah, air, dan energi yang sangat diperlukan bagi pembangunan.
- b. Dalam penelitian, penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber alam, serta dalam pembinaan lingkungan teknologi yang sesuai sehingga mutu dan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan.
- c. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang seksama terhadap pengaruhnya bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidupnya dapat dilakukan sebaik-baiknya. Penilaian tersebut perlu

dilakukan baik secara sektoral maupun regional dan untuk itu perlu dikembangkan kriteria mutu baku lingkungan hidup.

- d. Rehabilitasi sumber alam yang berupa tanah dan air yang rusak perlu lebih ditingkatkan lagi melalui pendekatan terpadu daerah aliran sungai dan wilayah. Dalam hubungan ini program penyelamatan hutan, tanah, dan air perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan.
- e. Pendayagunaan daerah pantai dan laut perlu ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.
- f. Dalam pembangunan pemukiman diberikan prioritas kepada perbaikan lingkungan hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA

1. Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - a. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
 - b. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.
 - c. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamankan baik di dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan.
 - d. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.
 - e. Melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.

- f. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.

Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :

- Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
- Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Pendidikan

- a. Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- b. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimaksudkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta.
- d. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- e. Perguruan Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional. Untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan.
- f. Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan keterampilan dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada.

- g. Mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan.
- h. Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja.
- i. Titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan.
- j. Pendidikan tinggi dikembangkan dan peranan Perguruan Tinggi diarahkan untuk :
- 1) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai pusat pemeliharaan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa datang;
 - 2) Mendidik mahasiswa-mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara Indonesia;
 - 3) Menggiatkan mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha-usaha pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - 4) Mengembangkan tata kehidupan kampus yang memadai dan tampak jelas corak khas kepribadian Indonesia.
- k. Makin meningkatkan peranan perguruan-perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam kegiatan pembangunan, antara lain dengan cara-cara :
- 1) Penggunaan kebebasan mimbar akademis dalam bentuk-bentuk yang kreatif, konstruktif dan bertanggung jawab, tetap dijamin sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan;
 - 2) Integrasi dan konsolidasi kegiatan-kegiatan mahasiswa dan cendekiawan sesuai dengan profesinya dalam wadah-wadah yang efektif sehingga mereka dapat menyumbangkan prestasi-prestasi serta partisipasi yang positif.

- l. Sarana dan prasarana pendidikan termasuk gedung, peralatan, perpustakaan, fasilitas kerja dan kondisi kehidupan yang layak bagi seluruh tenaga pendidikan dan pengajaran makin disempurnakan dan ditingkatkan.
- m. Pendidikan dan kegiatan olah raga ditingkatkan dan disebarluaskan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap orang dalam rangka pembinaan bangsa.
- n. Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia ditingkatkan dan diperluas sehingga mencapai masyarakat luas.
- o. Kepustakaan nasional, penerbitan dan penterjemahan dikembangkan, sehingga dapat lebih menunjang program-program pendidikan.
- p. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha pembinaan secara fungsional dan terintegrasi bidang pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka tercapainya suatu sistem pembinaan pendidikan secara nasional, mantap dan terpadu.

3. Kebudayaan

- a. Nilai budaya Indonesia terus dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional.
- b. Kebudayaan nasional terus dibina atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur. Dalam pada itu perlu ditadatkan dan dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit.
- c. Dengan tumbuhnya kebudayaan nasional yang berkepribadian dan berkesadaran maka sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.
- d. Disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha untuk memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan prasaja, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kewiraan.
- e. Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

- f. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.
- g. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia, sebagai salah satu sarana identitas nasional.
- h. Di dalam rangka pembinaan kesenian perlu dikembangkan kebijaksanaan yang menopang tumbuhnya kreativitas seniman yang sehat.
- i. Pembinaan kesenian daerah ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kesenian nasional agar dapat lebih memperkaya kesenian Indonesia yang beraneka ragam.
- j. Tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional.

4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian

- a. Kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada pengembangan kemampuan nasional dalam ilmu dan teknologi yang diperlukan dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan.

Cabang-cabang ilmu pengetahuan tertentu yang penting tetapi kurang peminatnya perlu mendapat perhatian khusus.
- b. Dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi pembangunan perlu diciptakan iklim yang menggairahkan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- c. Lembaga-lembaga penelitian ditingkatkan daya gunanya sesuai dengan prioritas pembangunan sedang di samping itu ditingkatkan pula sistem informasi mengenai kegiatan dan hasil penelitian.
- d. Dalam pembinaan ilmu pengetahuan perlu diciptakan iklim yang menjamin pertumbuhan dan obyektivitas ilmu pengetahuan yang diarahkan untuk kepentingan nasional. Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan kemampuan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, organisasi dan kegiatan cendekiawan serta diciptakan sistem penghargaan pada karya-karya ilmiah yang dapat mempertinggi martabat bangsa.

- e. Dalam mendorong kegiatan pembangunan diusahakan pengembangan serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna dengan meneliti secara seksama teknologi yang akan dipilih yang dapat menunjang peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

5. Kesehatan

- a. Dalam rangka mempertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan rakyat, maka ditingkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan mutu gizi. Peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi diutamakan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di kota.
- b. Perbaikan kesehatan rakyat dilakukan secara preventif dan kuratif dengan mendekatkan pelayanan kesehatan pada rakyat. Usaha perbaikan terutama ditujukan kepada peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, peningkatan keadaan gizi rakyat, peningkatan pengadaan air minum, peningkatan sanitasi lingkungan, perlindungan rakyat terhadap bahaya narkotika dan penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, penyediaan obat-obatan yang makin merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas, penyediaan tenaga medis dan para medis secara merata pula, peningkatan penyuluhan kesehatan rakyat, dan perluasan pelayanan kesehatan melalui pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit serta melalui berbagai cara lain guna meningkatkan kesehatan masyarakat desa.

6. Keluarga Berencana

- a. Program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.
- b. Pelaksanaan program keluarga berencana diusahakan diperluas keseluruh wilayah dan lapisan masyarakat termasuk daerah-daerah pemukiman baru.
- c. Jumlah peserta keluarga berencana ditingkatkan atas dasar kesadaran dan secara sukarela. Di samping itu dipelihara kelestarian peserta keluarga berencana yang telah ada sampai saat ini. Untuk itu perlu tersedia fasilitas keluarga berencana yang semakin meningkat dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Demikian pula perlu didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi-organisasi masyarakat dan pemuka-pemuka masyarakat, untuk memelihara peserta

keluarga berencana yang telah ada dan meningkatkan jumlah peserta keluarga berencana baru.

- d. Penerangan dan pendidikan mengenai masalah kependudukan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, perlu ditingkatkan agar makin disadari pentingnya masalah kependudukan pada umumnya dan masalah mengendalikan keluarga kecil sebagai cara hidup yang layak.

7. Kependudukan

- a. Kebijakan kependudukan perlu dirumuskan secara nasional dan menyeluruh dan dituangkan dalam program-program kependudukan yang terpadu.
- b. Kebijakan kependudukan yang perlu ditangani antara lain meliputi bidang-bidang pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang, pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata serta perkembangan dan penyebaran angkatan kerja.

8. Perumahan

- a. Dalam Pelita ketiga akan ditingkatkan pembangunan perumahan rakyat, khususnya rumah-rumah dengan harga yang dapat dijangkau oleh rakyat banyak.
- b. Untuk program pembangunan perumahan perlu dikembangkan suatu sistem yang lebih terarah dan terpadu, yang berkaitan dengan tata guna tanah perkotaan dan pedesaan, pembiayaan, perluasan kesempatan kerja, kesehatan lingkungan, produksi bahan bangunan lokal dan keserasian pembangunan daerah serta lingkungan pemukiman pada umumnya.
- c. Pembangunan perumahan rakyat dan perbaikan kampung yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah harus ditingkatkan, terutama untuk mendorong dan membina peranan, kemampuan dan prakarsa masyarakat sendiri untuk ikut serta dalam pembangunan pemukiman.
- d. Suatu sistem dan lembaga pembiayaan yang lebih efektif dan dapat mendorong terhimpunnya modal untuk pembangunan perumahan seperti yang telah dimulai dalam Pelita Kedua perlu lebih dikembangkan lagi sehingga memungkinkan pembangunan perumahan dalam jumlah yang besar dengan harga yang dapat dijangkau oleh rakyat banyak.

- e. Demikian pula perlu ditingkatkan produksi bahan-bahan bangunan murah secara massal yang memenuhi syarat kesehatan dan terbuat dari bahan-bahan yang terdapat di Indonesia.
- f. Penyuluhan mengenai teknik pembangunan perumahan serta pemugaran perumahan dan desa perlu ditingkatkan agar semakin banyak rakyat mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat pula.
- g. Penyediaan air bersih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

9. Kesejahteraan Sosial

- a. Perbaikan pelayanan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran serta kemampuan setiap warga negara untuk ikut serta di dalam pembangunan. Di samping itu, sebagai salah satu perwujudan usaha untuk menuju tercapainya keadilan sosial, maka diusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negara untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan sosial yang makin baik.
- b. Pemeliharaan orang-orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, dilaksanakan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu lebih ditingkatkan usaha-usaha agar orang-orang cacat dapat memperoleh kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuannya.
- c. Pembinaan cacat veteran supaya lebih ditingkatkan sesuai dengan darma baktinya kepada Bangsa dan Negara.
- d. bantuan sosial untuk korban bencana alam diselenggarakan sesuai dengan kemampuan yang tersedia dan dengan mengikut sertakan masyarakat luas.
- e. Sesuai dengan kemampuan yang ada jumlah panti-panti sosial ditingkatkan sehingga dapat memberikan penampungan dan pelayanan yang memadai bagi yang membutuhkannya. Di samping itu dipelajari dan diusahakan kemungkinan penyelenggaraan suatu jaminan sosial yang berdasarkan asas gotong-royong sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan masyarakat.
- f. Di dalam rangka memupuk dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial, maka perlu ditumbuhkan keagairahan dan kesediaan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.

10. Generasi Muda

- a. Pembangunan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan Bangsa dan pembangunan Nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti yang luhur.

Untuk itu perlu diciptakan iklim yang sehat, sehingga memungkinkan kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertanggung jawab.

Dalam rangka itu perlu ada usaha-usaha guna mengembangkan generasi muda untuk melibatkannya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Pengembangan wadah pembinaan generasi muda seperti sekolah, organisasi fungsional pemuda seperti antara lain KNPI, pramuka, organisasi olah raga dan lain-lainnya perlu terus ditingkatkan.

Untuk itu antara lain diusahakan bertambahnya fasilitas dan sarana yang memungkinkan pengembangan kepemudaan.

- c. Perlu diwujudkan suatu kebijaksanaan Nasional tentang kepemudaan secara menyeluruh dan terpadu.

11. Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa

- a. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. Oleh karena itu wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.
- b. Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
- c. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan keterampilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN
DAN PERS, HUBUNGAN LUAR NEGERI

1. Politik

- a. Pembangunan politik diarahkan untuk memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila.
- b. Dalam rangka memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta pelaksanaan mekanisme demokrasi Pancasila, perlu makin memantapkan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum.

Dalam hubungan ini perlu dilanjutkan langkah-langkah pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional; serta memantapkan berfungsinya dan saling berhubungan antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

- c. Pendidikan politik rakyat ditingkatkan, agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.
- d. Pemilihan umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia yang diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris dimana organisasi sosial politik peserta Pemilu ikut serta secara efektif dalam pelaksanaan Pemilu.
- e. Peranan kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai-partai Politik dan Golongan Karya sangat penting, oleh karenanya perlu ditingkatkan kemampuannya dalam memperjuangkan aspirasinya berdasarkan program, demi tercapainya tujuan nasional.

Untuk lebih memantapkan daya juangnya maka perlu penyesuaian peraturan perundangan yang mengaturnya.

- f. Meningkatkan terselenggaranya komunikasi sosial timbal balik antara masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat maupun dengan Pemerintah.
- g. Memantapkan organisasi-organisasi profesi/fungsional/ masyarakat agar makin besar peranannya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- h. Menyempurnakan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan.

2. Aparatur Pemerintah

- a. Aparatur Pemerintah ditingkatkan pengabdian dan kesetiiaannya kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara, yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- b. Pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perusahaan-perusahaan milik

negara dan milik daerah sebagai aparatur perekonomian negara dilakukan secara terus-menerus agar dapat mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar.

- c. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka penertiban aparatur Pemerintah serta dalam menanggulangi masalah-masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan.
- d. Hubungan fungsional yang makin mantap antara lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah perlu terus dikembangkan.
- e. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam rangka membina kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.
- f. Memperkuat pemerintahan desa, agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Untuk itu perlu disusun Undang-undang tentang Pemerintahan Desa.

3. **H u k u m**

- a. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- b. Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk :

- 1) peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta

- unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
- 2) menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing;
 - 3) meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;
 - 4) membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang Undang Dasar 1945.
- d. Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara.
- e. Dalam usaha Pembangunan Hukum Nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warganegara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

4. Penerangan dan Pers

- a. Dalam rangka mensukseskan pembangunan Nasional perlu ditingkatkan kegiatan penerangan dan peranan media massa. Untuk itu penerangan dan media massa bertugas menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin Nasional, serta mengarahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Pembinaan dan pengembangan pers nasional harus berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila, agar pers mampu menunjang pembangunan masyarakat Pancasila.
- c. Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan ke seluruh pelosok tanah air perlu ditingkatkan pemanfaatan sarana penerangan seperti radio, televisi, film, kantor berita dan lain-lainnya.
- d. Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan

komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini maka perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.

- e. Agar kegiatan penerangan dan peranan pers dapat makin efektif, maka perlu ditingkatkan kemampuan sarana dan prasarana penerangan dan pers, termasuk pendidikan dan latihan.
- f. Untuk menjamin pertumbuhan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab maka Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers perlu ditinjau kembali.

Sejalan dengan hal itu maka perlu dipersiapkan perangkat peraturan di bidang pers yang dapat lebih menjamin pertumbuhan pers yang sehat dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

5. Hubungan Luar Negeri

- a. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang.
- b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional.
- c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara Bangsa-bangsa.
- d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru.
- e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

PERTAHANAN-KEAMANAN NASIONAL

1. Pembangunan pertahanan-keamanan nasional secara keseluruhan harus dikaitkan dengan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang integral daripada pembangunan nasional. Setiap investasi harus menunjukkan kemanfaatan yang nyata dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan atau sasaran, serta harus memiliki waktu kegunaan yang cukup panjang. Suatu kegunaan tambahan hendaknya diusahakan apabila mungkin.

2. Prinsip ekonomi perlu diterapkan sebaik mungkin dalam usaha pertahanan-keamanan nasional; di samping itu efektivitas untuk menghadapi keadaan darurat harus tetap terjamin. Dalam keadaan aman dan damai dipelihara kekuatan pertahanan-keamanan nasional yang relatif kecil tetapi efisien dan efektif, yang dalam keadaan darurat harus dapat dikembangkan dengan cepat. Kebutuhan akan kemampuan pengembangan kekuatan ini menghendaki agar dirumuskan suatu sistem cadangan, yang mencakup kekuatan lapangan beserta segenap unsur, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukungnya.
3. Hak, kewajiban dan kehormatan turut serta dalam pembelaan negara dari setiap warga negara Indonesia, harus dilaksanakan dalam bentuk keadilan dan pemerataan menjalankan tugas pertahanan keamanan. Peranan rakyat sebagai sasaran maupun pelaku dalam perang total, menghendaki pembinaan mental mendapatkan prioritas yang tinggi. Ideologi Pancasila dan nilai-nilai bangsa harus tertanam dengan teguh dalam alam pikiran, sehingga mewujudkan suatu ketahanan mental yang tangguh. Keahlian dan keterampilan melakukan pekerjaan harus dibina agar setiap orang dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna. Untuk itu perlu segera disusun Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan Nasional.
4. Dalam rangka modernisasi penyelenggaraan pertahanan-keamanan nasional hendaklah digunakan perlengkapan yang disesuaikan dengan tingkat kemajuan teknologi bangsa Indonesia.

Hasil produksi dalam negeri harus diutamakan. Keharusan untuk mengurangi ketergantungan kepada luar negeri menuntut dibangunnya industri pertahanan-keamanan nasional ataupun industri umum yang dapat digunakan untuk itu, sedikit-tidaknya untuk memproduksi perlengkapan dan bekal yang paling vital.

5. Suatu penelitian nasional perlu dilaksanakan untuk membuat inventarisasi kemampuan industri dalam negeri guna mendukung penyelenggaraan pertahanan-keamanan nasional dan direncanakan cara-cara pemanfaatannya dalam keadaan darurat.
6. Pemeliharaan dan perawatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kesiapan peralatan yang juga menentukan tingkat kemampuan pertahanan keamanan. Oleh karena itu kemampuan pemeliharaan yang tinggi yang meliputi keahlian, bahan-bahan dan alat-alat pemeliharaan, perlu mendapat perhatian. Keterbatasan jumlah peralatan yang dimiliki agar diimbangi dengan kemampuan pemeliharaan yang tinggi.
7. Kekuatan lapangan menurut sifat dan tugas khasnya masing-masing, harus direncanakan menempati posisi-posisi strategis yang memungkinkan

dilakukannya reaksi yang cepat terhadap ancaman yang datang. Daerah-daerah perbatasan, alur-alur pelayaran dan selat-selat yang penting, perlu dinilai tingkat kemungkinannya menjadi arah pendekat potensial bagi berbagai bentuk ancaman, untuk kemudian digunakan sebagai dasar penentu dislokasi kekuatan atau pangkalan yang sesuai. Perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada kekuatan pemukul, yang perlu memperoleh latihan-latihan terus menerus dengan dukungan fasilitas yang sebaik mungkin. Daerah-daerah latihan yang cukup luas di luar Jawa yang sekaligus dijadikan pangkalan bagi satuan-satuan perlu memperoleh prioritas yang tinggi dalam pembangunan pertahanan-keamanan nasional.

8. Berbagai hal dalam penyelenggaraan pertahanan-keamanan nasional, karena menyangkut kepentingan berbagai pihak dan rakyat banyak, harus direncanakan dan perlu segera diwujudkan.
9. Penelitian dan pengembangan yang tertuju pada perwujudan perlengkapan, umumnya memerlukan dana, daya dan waktu yang sangat banyak. Penghematan dalam bidang ini dapat dicapai melalui kerjasama yang erat dengan pihak sipil dan swasta. Hendaknya selalu dicegah kegiatan-kegiatan yang bersifat duplikasi; pengalihan pengetahuan dan teknologi dari luar negeri melalui berbagai cara dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penguasaan dan usaha pengembangan.
10. Keberhasilan tugas pertahanan-keamanan nasional banyak tergantung pada dukungan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, upaya pertahanan-keamanan nasional harus dapat memanfaatkan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Manajemen pertahanan-keamanan, yang mencakup manajemen Angkatan Bersenjata dan Departemen Pertahanan Keamanan, haruslah bisa dilaksanakan secara efektif dan dengan efisiensi yang tinggi. Untuk itu selalu diusahakan penerapan dan pengembangan manajemen yang mutakhir.
12. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi terlebih lagi mencintai kemerdekaan dan kedaulatannya. Perang sebagai jalan pemecahan terakhir, hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, daya upaya untuk memperoleh dan mempertahankan keadaan aman dan damai harus selalu diusahakan oleh segenap rakyat bersama ABRI.
13. Kekaryaannya ABRI yang merupakan penjelmaan jiwa dan semangat pengabdian ABRI sebagai kekuatan sosial, bersama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

14. Operasi Bakti ABRI merupakan suatu peluang untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga dalam menunjang kepentingan nasional.
15. Pembinaan kemampuan pertahanan-keamanan nasional diusahakan untuk meningkatkan kemampuan unsur-unsur Hankam yang meliputi kemampuan kekuatan di darat, di laut, di udara, penertiban dan penyelamatan masyarakat serta unsur-unsur kemampuan lainnya sehingga ABRI mampu melaksanakan tugas-tugas pertahanan-keamanan nasional sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia.
16. Pembinaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial diarahkan agar ABRI mampu untuk :
 - a. bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional;
 - b. meningkatkan peranannya secara aktif dalam memperkokoh ketahanan nasional.

E. PELAKSANAAN PELITA TIGA

Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun ini dilakukan oleh Presiden selaku Mandataris MPR dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari DPR dalam menyusun Repelita Ketiga yang merupakan rencana pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan diberbagai bidang dalam tahun 1979-1984.

Program pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasionil dalam bentuk APBN.

Dalam meningkatkan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan wajib meningkatkan kegiatannya sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

B A B V

P E N U T U P

Berhasilnya pembangunan Nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan Ketahanan Nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

www.tatanusa.co.id